BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan yaitu proses untuk melakukan perubahan.¹ Pembangunan dimaknai sebagai bentuk proses guna membuat perubahan lebih baik yang ditujukan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan pembangunan ekonomi adalah usaha mengubah secara struktural dengan tujuan agar produktivitas meningkat dan membangun kesempatan kerja yang pada akhirnya pendapatan masyarakat meningkat. Pembangunan ekonomi ini mengimplikasikan bermacam perubahan mulai dari struktur sosial, sikap masyarakat, dan lembaga nasional termasuk pertumbuhan ekonomi yang pesat, penurunan ketidakmerataan dan kemiskinan.²

Pembangunan ekonomi yang berhasil bisa dilihat dari beberapa faktor diantaranya pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), investasi dalam infrastruktur, ketimpangan ekonomi, dan tingkat pengangguran. Salah satu parameter guna melihat berhasil tidaknya pembangunan ekonomi yakni tingkat pengangguran. Pengangguran yaitu seseorang yang berumur 15-64 tahun yang sedang berupaya memperoleh pekerjaan dan belum memperoleh pekerjaan yang diinginkan.³ Untuk mengukur pengangguran yakni dengan menggunakan indikator Tingkat Pengangguran Terbuka yang dihitung dari perbandingan kuantitas pengangguran dengan kuantitas angkatan kerja dalam bentuk persen.⁴ Pengangguran terbuka yaitu seseorang yang tidak memiliki pekerjaan dan berusaha mendapatkan pekerjaan, mempersiapkan untuk mendirikan bisnis sendiri, seseorang tidak dalam proses guna memperoleh pekerjaan, dan seseorang yang telah memperoleh pekerjaan namun belum memulai pekerjaannya. Secara teoritis pengangguran bisa terjadi karena ketidak seimbangan antara pertumbuhan penduduk usia kerja

¹ Drajat Tri Kartono dan Hanif Nurcholis, *Pembangunan Masyarakat Desa Dan Kota*, 7.

² Stephen C. Smith Michael P. Todaro, *Pembangunan Ekonomi* (Jakarta: Erlangga, 2011), 35-36.

³ Suparmono, *Pengantar Ekonomika Makro* (Yogyakarta: AMP YKPN, 2004), 164.

⁴ N.Gregory Mankiw, *Teori Makro Ekonomi*, Edisi Kelima (Jakarta: Erlangga, 2003), 126.

dengan lapangan pekerjaan yang tersedia. Penduduk yang tidak mempunyai pekerjaan dan pendapatan akan berakibat pada rendahnya standar hidup.⁵ Dimana tingginya pengangguran bisa menyebabkan gangguan politik, keamanan, dan sosial yang mampu mengganggu pembangunan di suatu daerah. Kemudian minimnya pendapatan masyarakat ini menyebabkan pengeluaran konsumsinya berkurang dan berakibat pada penurunan kemakmuran dan kesejahteraan.⁶

Sehubungan dengan akibat yang ditimbulkan dari pengangguran, agama Islam telah melarang kepada umatnya agar tidak menganggur dan menggantungkan diri dari belas kasihan orang lain seperti meminta-minta. Usaha dengan kerja keras sangat ditekankan sebagai kewajiban umat Islam. Sehingga, bekerja bukan hanya memenuhi kebutuhan namun juga bernilai ibadah bilamana jika dilakukan sungguh-sungguh akan memperoleh pahala.⁷ Sebagaimana dijelaskan Al-Qur'an Surah At-Taubah ayat 105 bahwa Allah memohon umatnya untuk beramal dan bekerja keras dengan niat supaya memperoleh ridha dari Allah SWT, yang berbunyi:⁸

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Artinya: Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan (Q.S At-Taubah: 105).

Setiap negara, utamanya negara berkembang seperti Indonesia, pengangguran adalah problem makro yang belum bisa terselesaikan. Problem pengangguran di Indonesia ini menjadi masalah utama di beragam provinsi, salah satunya di Banten.

Banten merupakan provinsi muda dari pemekaran Jawa Barat. Terjadinya pemekaran tersebut disebabkan karena ketertinggalan pembangunan dan pemekaran wilayah Banten ini

⁵ Hasyim, *Ekonomi Makro* (Jakarta: Kencana, 2017), 186.

⁶ Asfia Murni, *Ekonomika Makro* (Bandung: Refika Aditama, 2009) 126-127.

⁷ Ahmad Samiun Jazuli, *Kehidupan Dalam Pandangan Al-Qur'an* (Depok: Gema Insani, 2006), 284.

⁸ Naf'an Akhun, *Al-Qur'an Terjemahan* (Semarang: CV Toha Putra, 2019), 289.

bertujuan guna meningkatkan kesejahteraan penduduknya serta mengingat Banten juga memiliki potensi besar industrinya. Setelah terpisah dengan Jawa Barat, bukan berarti pembangunan di Provinsi Banten bisa berjalan mulus tanpa hambatan. Banten kini dihadapkan problem pengangguran yang setiap tahunnya mengalami fluktuatif dan tergolong tinggi. Sebagaimana menurut Sukirno bahwa tingkat pengangguran yang normal itu 2-3%.⁹

Tabel 1.1
Tingkat Pengangguran Terbuka di Pulau Jawa (%)

Provinsi	2020	2021	2022
DKI Jakarta	10,95	8,50	7,18
Jawa Barat	10,46	9,82	8,31
Jawa Tengah	6,48	5,95	5,57
DI Yogyakarta	4,57	4,56	4,06
Jawa Timur	5,84	5,74	5,49
Banten	10,64	8,98	8,09

Sumber: BPS, 2023.

Tabel 1.1 menunjukkan tingkat pengangguran di Pulau Jawa dari tahun 2020-2022 terjadi fluktuasi. Banten sebagai provinsi muda, Tingkat Pengangguran Terbuka berada di urutan kedua tertinggi setelah Jawa Barat. Pada tahun 2020 Tingkat Pengangguran Terbuka di Banten sebesar 10,64%. Tingginya nilai pengangguran ini disebabkan pandemi Covid-19 berimbas pada pendapatan pekerja, pengurangan pekerja bahkan pemutusan hubungan kerja (PHK) sehingga pengangguran terjadi kenaikan. Selain disebabkan Covid-19, yaitu karena terjadi ketidak seimbangan banyaknya penduduk dengan tersedianya lapangan pekerjaan, maka menjadikan pertumbuhan lapangan kerja melambat dibanding pertumbuhan tenaga kerja dan pada akhirnya pengangguran mampu meningkat. Kemudian pada tahun 2021-2022, Provinsi Banten mengalami penurunan yaitu sebesar 8,98 % dan 8,09 %. Turunya Tingkat Pengangguran Terbuka ini yakni setelah pandemi covid-19 berakhir kegiatan perekonomian sudah kembali normal dan stabil dimana perusahaan industri melakukan penawaran atas kesempatan bekerja. Selain itu, turunya pengangguran di Banten juga dikarenakan pemerintahan Banten telah melakukan berbagai programnya yaitu pemberdayaan UMKM, pelatihan kerja, dan

⁹ Sadono Sukirno, *Pengantar Teori Makro Ekonomi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), 325.

bekerja sama antara SMK dengan industri untuk melahirkan angkatan kerja yang siap dan bisa bersaing di dunia kerja.

Provinsi Banten juga termasuk kedalam provinsi tiga besar dalam Tingkat Pengangguran Terbuka Indonesia serta tingkat penganggurannya berada diatas rerata tingkat pengangguran nasional.¹⁰

Tabel 1.2
Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka di Banten dan Indonesia (%)

Tahun	Banten	Indonesia
2018	8,47	5,30
2019	8,11	5,23
2020	10,64	7,07
2021	8,98	6,49
2022	8,09	5,86

Sumber: BPS, 2023.

Tabel 1.2 menunjukkan tahun 2018-2022 tingkat pengangguran Banten selalu diposisi di atas rerata tingkat pengangguran nasional. Bahkan pada tahun 2018-2019 Banten menduduki pengangguran paling tinggi di Indonesia. Kemudian pada tahun 2020-2022 tingkat pengangguran di Banten terjadi penurunan, namun masih masuk kedalam tiga besar tingkat pengangguran nasional.

Kaitannya dengan pengangguran, upah merupakan salah satu cara meningkatkan kemakmuran dan mendorong peran pekerja agar mampu meningkatkan produksi.¹¹ Terjadinya kenaikan upah minimum bisa meningkatkan pengangguran, yang mana jika harus menaikkan upah maka akan memberikan tambahan pada upah pekerja, kemudian upah ini bisa ditekan dengan melakukan efisiensi pada pengurangan pekerja.¹²

Tabel 1.3
Rata-Rata Upah Minimum di Pulau Jawa (Rupiah)

Povinsi	2020	2021	2022
---------	------	------	------

¹⁰ Amgi Filiasari and Achma Hendra Setiawan, “Pengaruh Angkatan Kerja, Upah, PDRB, Dan Pendidikan Terhadap Tingkat Pengangguran Di Provinsi Banten Tahun 2002-2019,” *Diponegoro Journal of Economics* 10, no. 2 (2021): 1–10, <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dje>.

¹¹ I Nyoman Sutama, Asmini, and Suci Astika, “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penetapan Upah Minimum Kabupaten Sumbawa Tahun 2013-2017,” *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 16, no. 3 (2019): 281–91.

¹² Sadono Sukirno, *Pengantar Teori Makro Ekonomi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), 327.

DKI Jakarta	3.648.036	3.940.973	4.276.350
Jawa Barat	1.544.361	1.668.373	1.810.351
Jawa Tengah	1.486.065	1.605.396	1.742.015
DI Yogyakarta	1.454.154	1.570.923	1.704.608
Jawa Timur	1.508.895	1.630.059	1.768.777
Banten	2.099.385	2.267.990	2.460.997

Sumber: BPS, 2023.

Tabel 1.3 memperlihatkan urutan upah minimum Pulau Jawa dari paling tertinggi tahun 2020-2022 yaitu DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan DI Yogyakarta. Provinsi Banten menduduki urutan kedua upah minimum tertinggi dan berada di atasnya Jawa Barat yang dulunya merupakan pernah menjadi bagian wilayahnya. Tingginya upah minimum di Banten disebabkan pesatnya industri yang ada pada wilayah tersebut. Selain itu Banten juga berada di letak strategis dimana memiliki batas dengan ibu kota negara DKI Jakarta dan berdekatan dengan Selat Sunda menjadikan sebagai pintu jalur utama perdagangan Pulau Jawa, Sumatera hingga menjadi bagian terpenting dalam sirkulasi perdagangan Asia dan Internasional. Kedua hal tersebutlah yang mampu mempengaruhi nominal upah minimum Provinsi Banten. Adanya kenaikan upah minimum tersebut mampu menaikkan daya beli pekerja yang bisa menjadikan semangat bekerja dan produktivitas mampu meningkat. Namun, naiknya upah tersebut realitanya belum bisa mengatasi tingkat pengangguran Provinsi Banten terbukti pada tahun 2020-2022.

Kaitannya dengan pengangguran, angkatan kerja merupakan penduduk usia kerja yang berperan penting dalam peningkatan produktivitas.¹³ Banyaknya angkatan kerja yang terserap pada lapangan kerja menjadikan produktivitas ekonomi meningkat. Tetapi, naiknya angkatan kerja bisa berakibat pada peluang kerja yang semakin kecil sehingga berpotensi pengangguran dimana terjadi ketidak seimbangan angkatan kerja

¹³ Julianto Tholling Himo, Debby Ch. Rotinsulu, and Krest D. Tolosang, "Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Dan Angkatan Kerja Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka Di 4 Kabupaten Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2010-2019," *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi* 22, no. 4 (2022): 124-35, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jbie/article/view/42238/37378>.

dengan jumlah lapangan pekerjaan.¹⁴ Pada angkatan kerja bisa diketahui besaran presentase penduduk usia kerja yang aktif pada aktivitas ekonomi di daerah tertentu yaitu dengan melalui tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK).

Tabel 1.4
Angkatan Kerja Provinsi Banten

Tahun	(%)
2018	62,95
2019	63,83
2020	64,48
2021	63,79
2022	64,72

Sumber: BPS Banten, 2023.

Tabel 1.4 memperlihatkan angkatan kerja di Provinsi Banten dari tahun 2018-2022 mengalami fluktuatif. Penurunan angkatan kerja di Banten bisa terjadi karena dari golongan angkatan kerja bergeser menjadi bukan angkatan kerja.¹⁵ Sedangkan pada kenaikan angkatan kerja di Banten ini disebabkan meningkat tajamnya pertumbuhan penduduk, sehingga usia kerja aktif juga naik. Apabila, bertambahnya angkatan kerja ini tidak sebanding dengan lapangan kerja, maka kedepannya bisa menjadi beban perekonomian. Kondisi kenaikan yang terjadi pada angkatan kerja tersebut akan meningkatkan peluang persaingan dalam pasar tenaga kerja, dan akhirnya pengangguran meningkat.¹⁶

Kaitannya dengan pengangguran, kesejahteraan penduduk bisa ditunjukkan dari faktor angka harapan hidup.¹⁷ Angka harapan hidup memberikan dampak pada ekonomi dan kesejahteraan sosial dimana hal tersebut berdampak pada beban psikologi dan psikis sehingga dapat melemahkan keterampilan dan mengakibatkan rasa malas dalam bekerja. Hal tersebut

¹⁴ Mohamad Ibnu Dinar and Nurfahmiyati, “Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pengangguran Terbuka Di Indonesia Pada Tahun 2011-2021,” *Bandung Conference Series: Economics Studies* 2, no. 1 (2022), <https://doi.org/10.29313/bcses.v2i1.2481>.

¹⁵ Filiasari and Setiawan, “Pengaruh Angkatan Kerja, Upah, PDRB, Dan Pendidikan Terhadap Tingkat Pengangguran Di Provinsi Banten Tahun 2002-2019.”

¹⁶ A N M Lumi, E N Walewangko, and A L C P Lopian, “Analisis Pengaruh Jumlah Angkatan Kerja Dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Pengangguran Di Kota-Kota Provinsi Sulawesi Utara,” *Jurnal EMBA* 9, no. 3 (2021): 162–72.

¹⁷ Dinar and Nurfahmiyati, “Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pengangguran Terbuka Di Indonesia Pada Tahun 2011-2021.”

mengakibatkan peningkatan pengangguran apabila tingkat harapan hidup di suatu daerah masih minim.¹⁸

Tabel 1.5
Angka Harapan Hidup di Pulau Jawa (tahun)

Povinsi	2020	2021	2022
DKI Jakarta	72,91	73,01	73,32
Jawa Barat	73,04	73,23	73,52
Jawa Tengah	74,37	74,47	74,57
DI Yogyakarta	74,99	75,04	75,08
Jawa Timur	71,30	71,38	71,74
Banten	69,96	70,02	70,39

Sumber: BPS, 2023.

Tabel 1.5 menunjukkan angka harapan hidup di Pulau Jawa tahun 2020-2022 dalam setiap tahunnya mengalami fluktuatif. Angka harapan hidup di Pulau Jawa paling tinggi Provinsi DI Yogyakarta dan terendah Provinsi Banten. Walaupun angka harapan hidup Banten lebih rendah dari keenam provinsi tersebut, namun dalam setiap tahunnya terus mengalami kenaikan. Angka harapan hidup Provinsi Banten ini sebanding dengan teori *Human Capital* bahwa manusia merupakan investasi di masa mendatang dari sisi kesehatannya untuk meningkatkan produktivitas dimana jika angka harapan hidup terjadi kenaikan maka pengangguran dapat menurun.¹⁹

Penelitian sebelumnya terkait dengan Tingkat Pengangguran Terbuka diantaranya penelitian yang dilakukan penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Sahlan Hadi, Westi Riani, dan Ria Haryatiningsih tahun 2022 menyatakan upah minimum berpengaruh positif terhadap pengangguran terbuka.²⁰ Selanjutnya penelitian oleh Sari Fatimah dan Yuni Prihadi Utomo tahun 2023 menemukan hasil bahwa angkatan kerja tidak

¹⁸ Khairil Anwar and dan Muhammad Abdy Yusuf, “Pengaruh Angka Harapan Hidup (AHH) Dan Konsumsi Per Kapita Terhadap Pengangguran the Effect of Life Expectations and Per Capita Consumption on Unemployment,” *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan* 11 (2020): 142–50.

¹⁹ I Dewa Gede Karma Wisana, “Kesehatan Sebagai Suatu Investasi,” *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia* 1, no.1 (2001): 42-50.

²⁰ Ahmad Sahlan Hadi and Westi Riani, “Pengaruh Laju Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Dan Upah Minimum Provinsi Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka Di Pulau Jawa Tahun 2016-2020,” *Bandung Conference Series: Economics Studies* 2, no. 2 (2022): 446–54, <https://doi.org/10.29313/bcses.v2i2.4470>.

mempengaruhi tingkat pengangguran terbuka.²¹ Kemudian Amgi Filiasari dan Achma Hendra Setiawan tahun 2021 dalam penelitiannya menemukan bahwa angkatan kerja berpengaruh negatif terhadap tingkat pengangguran terbuka.²² Novella Luckytha Putri dan Sri Muljaningsih tahun 2023 dalam penelitiannya menemukan bahwa upah minimum dan angka harapan hidup memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka.²³ Sedangkan penelitian oleh Chalirafi Khairil Anwar tahun 2020 memberikan hasil angka harapan hidup tidak mempengaruhi tingkat pengangguran terbuka.²⁴

Ketidak konsistenan hasil pada penelitian tersebut, maka terdapat *gap research* pada variabel upah minimum, angkatan kerja, dan angka harapan hidup terhadap tingkat pengangguran terbuka. Selain itu pada penelitian sebelumnya, kajian tentang tingkat pengangguran terbuka yang dikaitkan dengan upah minimum, angkatan kerja, dan angka harapan hidup masih sedikit yang meneliti. Kebanyakan penelitian sebelumnya menggunakan dua sampai empat variabel dan menggunakan variabel bebas yang lain. Kemudian, subjek pada penelitian berbeda, yakni di Provinsi Banten dalam rentan waktu pengamatan tahun 2017-2022. Oleh karenanya, diperlukan kajian lebih mendalam untuk memahami bagaimana upah minimum, angkatan kerja, dan angka harapan hidup mempengaruhi tingkat pengangguran terbuka di Banten. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka peneliti akan melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul **“Pengaruh Upah Minimum, Angkatan Kerja, dan Angka Harapan Hidup Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Banten Tahun 2017-2022”**.

²¹ Sari Fatimah et al., “Analisis Pengaruh Jumlah Angkatan Kerja, Upah Minimum, Penanaman Modal Dalam Negeri, Proporsi Pdrb Sektor Industri, Proporsi Pdrb Sektor Jasa Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka Di Provinsi Jawa Tengah,” *Jurnal Bisnis Dan Manajemen* 3, no. 3 (2023): 2477–1783.

²² Filiasari and Setiawan, “Pengaruh Angkatan Kerja, Upah, PDRB, Dan Pendidikan Terhadap Tingkat Pengangguran Di Provinsi Banten Tahun 2002-2019.”

²³ Novella Luckytha Putri and Sri Muljaningsih, “Analisis Inflasi, Upah Minimum, dan Angka Harapan Hidup Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten/Kota Provinsi Banten,” *JDESS* 2, no. 3 (2023): 463–474.

²⁴ Anwar and Muhammad Abdy Yusuf, “Pengaruh Angka Harapan Hidup (Ahh) Dan Konsumsi Per Kapita Terhadap Pengangguran the Effect of Life Expectations and Per Capita Consumption on Unemployment.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah penelitian, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Apakah upah minimum berpengaruh terhadap tingkat pengangguran terbuka di Banten tahun 2017-2022?
2. Apakah angkatan kerja berpengaruh terhadap tingkat pengangguran terbuka di Banten tahun 2017-2022?
3. Apakah angka Harapan Hidup berpengaruh terhadap tingkat pengangguran terbuka di Banten tahun 2017-2022?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Guna mengetahui pengaruh upah minimum terhadap tingkat pengangguran terbuka di Banten tahun 2017-2022.
2. Guna mengetahui pengaruh angkatan kerja terhadap tingkat pengangguran terbuka di Banten tahun 2017-2022.
3. Guna mengetahui pengaruh angka harapan hidup terhadap tingkat pengangguran terbuka di Banten tahun 2017-2022

D. Manfaat Penelitian

Penyusunan penelitian ini diharapkan mampu bermanfaat bagi peneliti maupun pihak lain yang membutuhkan. Manfaat penelitian ini yakni:

1. Penelitian ini diharapkan bisa menambah pengetahuan dan wawasan bagi peneliti maupun pembaca terkait pengaruh upah minimum, angkatan kerja, dan angka harapan hidup terhadap tingkat pengangguran terbuka.
2. Penelitian ini diharapkan bisa dijadikan sumber referensi guna penelitian berikutnya terkait permasalahan pengaruh upah minimum, angkatan kerja, dan angka harapan hidup terhadap tingkat pengangguran terbuka.
3. Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi wawasan pada bidang ekonomi.

E. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan penelitian dibutuhkan sistematika penulisan agar mampu menjadi gambaran dari bahasan, sehingga pembaca akan lebih mudah memahaminya. Maka sistematika dalam penulisan skripsi ini yaitu:

1. Bagian Awal

Pada bagian awal mencakup halaman sampul, halaman nota persetujuan pembimbing, halaman nota pengesahan, halaman moto, halaman persembahan, kata pengantar, abstrak, daftar isi, dan daftar tabel.

2. Bagian Isi

Bagian isi ini mencakup bab I sampai bab V, secara rinci bab tersebut berisikan hal sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini memuat: latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan penelitian.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab dua memuat uraian dari deskripsi teori dan tinjauan pustaka mengenai judul penelitian yakni pengangguran, upah minimum, angkatan kerja, dan angka harapan hidup, penelitian terdahulu, kerangka berpikir, dan hipotesis penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab tiga memuat uraian meliputi: jenis dan pendekatan penelitian, *setting* penelitian, populasi dan sampel, identifikasi variabel dan definisi operasional variabel, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab empat memuat uraian gambaran umum obyek penelitian, deskripsi data, analisis data, dan pembahasan.

BAB V: PENUTUP

Bab lima memuat kesimpulan, keterbatasan penelitian dan saran.

3. Bagian Akhir

Bagian terakhir dalam penelitian ini mencakup daftar pustaka dan berbagai lampiran.